



## MALIOBORO TETAP DILARANG UNTUK KAMPANYE

# 4 Rumah Sakit Dirikan TPS

**YOGYA (KR)** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta resmi menyetujui pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Sakit. Terdapat 4 Rumah Sakit yang akan didirikan TPS. Hal ini untuk mengakomodasi pemilih dalam menggunakan suaranya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang.

Keempat rumah sakit tersebut ialah PKU Muhammadiyah, Panti Rapih, Bethesda dan Ludira Husada. Namun khusus untuk PKU Muhammadiyah, KPU Kota Yogyakarta masih menunggu daftar pemilih dari pihak rumah sakit. "Sepanjang rumah sakit itu menyediakan daftar pemilih, maka TPS pasti bisa kami dirikan disana," terang Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto di sela Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres di Hotel Gowongan Inn, Senin (9/6).

Selain itu, TPS khusus juga akan didirikan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Wirogunan. Masing-masing satu TPS. Pada Pileg 9 April 2014 lalu, hanya

Lapas Wirogunan yang didirikan TPS. Sedangkan Rutan Wirogunan maupun rumah sakit, belum disediakan TPS secara khusus.

Wawan menambahkan, total rumah sakit di Kota Yogyakarta sebenarnya mencapai 18 unit. Namun tidak semua rumah sakit tersebut mampu menyediakan daftar pemilih yang berisi dokter, karyawan, perawat serta pasien. "Rumah sakit yang tidak didirikan TPS, akan diakomodasi oleh TPS yang ada di sekitarnya. Petugas kami siap untuk *mobile* menjemput pasien," imbuhnya.

Sementara total pemilih yang ditetapkan dalam DPT, sementara mencapai 309.970 pemilih. Hal itu belum termasuk data pemilih dari RS PKU Muhammadiyah yang

diprediksi sekitar 480 orang.

Terpisah, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengemukakan, selama masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) kawasan Malioboro tidak boleh digunakan sebagai ajang kampanye. Konsekuensi dari itu, selain tidak boleh ada alat peraga, kawasan Malioboro tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye kedua kandidat calon presiden (Capres) maupun calon wakil presiden (Cawapres).

"Saat ini peraturan walikota (Perwal) berkaitan dengan hal itu sedang dibuat. Harapannya semua kandidat, bisa mengikuti ketentuan yang ada seperti saat Pemilu Legislatif (Pileg) kemarin," kata Walikota Yogyakarta Drs Haryadi Suyuti di Kompleks Kepatihan, Senin (9/6).

Haryadi Suyuti mengatakan, seperti dalam Pileg kemarin, kawasan Malioboro tidak boleh dipergunakan sebagai tempat kampanye. Baik oleh partai politik (Parpol) pendukung maupun para kandidat. Karena se-

lain menjadi pusat perekonomian bagi sebagian masyarakat, sampai saat ini Malioboro masih menjadi ikon wisata di Yogyakarta dan DIY pada umumnya. Mengingat keberadaan Malioboro yang cukup penting, bagi perkembangan dunia pariwisata di DIY, alangkah baiknya jika kekhasan tersebut tetap dijaga. Salah satu caranya dengan tidak menjadikan tempat tersebut sebagai ajang kampanye.

"Rencananya Perwal berkaitan dengan hal itu akan disahkan dalam minggu ini. Karena saat ini segala sesuatunya, termasuk draf sudah dipersiapkan," ungkap Haryadi.

Menurut Haryadi, ketentuan atau aturan tentang larangan Malioboro sebagai ajang kampanye, tidak akan jauh berbeda dengan Pileg. Kendati demikian pihaknya berharap agar para kandidat Capres-Cawapres maupun tim pendukung bisa benar-benar mentaati aturan tersebut. **(R-9/Ria/\*-24)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005